LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN JUNI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 8 Juli 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Kepala Bidang/Pejabat Eselon III
2. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
3. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
4. Bendahara Pengeluaran Pembantu
5. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 47,89 %

b.Keuangan = 9.165.586.981 (44,58%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000			1.917.140		
1	Pelaksanaan Pelatihan Pegawai	10.000.000	49	48,80	1.917.140	(0,20)	Menyesuaikan undangan pelatihan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10.000.000			0		

1	Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota	10.000.000	100	0	0	(100)	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	57.720.000			0		
1	Rapat persiapan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	1.300.000	100	0	0	(100)	Anggaran DAK BOPPA Manajemen menyesuaikan Permen PPA Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun anggaran 2022. Bahwa BOPPA Manajemen tidak diperbolehkan pada Perlindungan Perempuan.
2	Pelaksanaan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	55.390.000	100	0	0	(100)	Anggaran DAK BOPPA Manajemen menyesuaikan Permen PPA Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun anggaran 2022. Bahwa BOPPA Manajemen tidak diperbolehkan pada Perlindungan Perempuan.
3	Pelaporan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	1.030.000	100	0	0	(100)	Anggaran DAK BOPPA Manajemen menyesuaikan Permen PPA Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun anggaran 2022.

							Bahwa BOPPA Manajemen tidak diperbolehkan pada Perlindungan Perempuan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.675.000			4.400.000		
1	4. Pelaksanaan Koordinasi Puspaga	7.675.000	85,34	57,34	4.400.000	(28)	anggaran akan digunakan untuk kegiatan dalam rangkaian hari anak nasional di bulan juli
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.320.000			7.339.516		
1	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7.466.000	100	30,51	1.948.879	(69,49)	SSK diundur pelaksanaannya menyesuaikan jadwal mitra BKOW
2	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat	16.294.000	100	0	0	(100)	SSK diundur pelaksanaannya menyesuaikan jadwal mitra BKOW

	Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW						
3	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pembuatan buku panduan lansia perempuan	17.050.000	100	0	0	(100)	SSK diundur pelaksanaannya
4	Kegiatan Opersional DWP Tahun 2020	7.860.000	66,66	44,46	2.430.637	(22,20)	SSK menyesuaikan jadwal mitra kerja DWP
5	Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota	16.650.000	50	27,18	2.960.000	(22,82)	SSK diundur menyesuaikan jadwal mitra kerja DWP
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000			1.000.000		
1	Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia)	2.000.000	100	50	1.000.000	(50)	Kegiatan diadakan 2 kali bulan maret dan juli

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	12	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan Juni terdapat 6 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Pelatihan Pegawai dikarenakan menyelesaikan undangan pelatihan;
2. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan bulan Juli;

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi terdapat 3 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Rapat persiapan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA, Pelaksanaan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA, dan Pelaporan Kegiatan pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA;
4. Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Koordinasi Puspaga dikarenakan anggaran akan digunakan untuk kegiatan dalam rangkaian Hari Anak Nasional di Bulan Juli;
5. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 5 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW, Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW, Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pembuatan buku panduan lansia perempuan, Kegiatan Opersional DWP Tahun 2020 dan Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota dikarenakan SSK diundur pelaksanaannya menyesuaikan jadwal mitra kerja masing-masing. Khusus untuk SSK Kegiatan Opersional DWP Tahun 2020 terdapat kendala juga pada e-blangkon;
6. Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia) dikarenakan kegiatan perlu diadakan 2 kali;
7. Kegiatan DAK Non Fisik BOPPA Manajemen tidak bisa dilaksanakan karena menyesuaikan hasil review KPPPA (Seksi PP);
8. BOPPA Pencegahan ada perubahan rekening Uang Harian menjadi Uang Transport sehingga harus melakukan pergeseran (Seksi PP dan PA);
9. BOPPA Pencegahan pada Rakor Pencegahan KTA dan TPPO tidak bisa dilakukan secara keseluruhan pada bulan Juli (Seksi PA);
10. Rapergub Perlindungan Anak masih dalam proses di Biro Hukum (Seksi PA);
11. Meningkatnya kekerasan terhadap anak (seksi PA);
12. SK Lomba Pelaksana Terbaik Penggerakan dan Baksos KB masih menunggu tandatangan Gubernur (Seksi KIE);
13. Proses penyelesaian Rekomendasi LKPJ Tahun 2021 terkait RAD Terhadap Pengendalian Penduduk dan KB Berbasis Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi KIE (KBKIE);
14. Masih belum lengkap pendataan PPKBD yang mendampingi Akseptor di Kabupaten/Kota (Seksi KB);
15. Terdapat selisih kekurangan bayar ATK sebesar Rp 10,- di e-blangkon pada SSK Peningkatan KIE Melalui Vlog dan Tiktok tentang KB (seksi KB);
16. Kegiatan PPEP dilaksanakan 1 hari sehingga tidak maksimal dalam upaya pemberdayaan perempuan yang ada di desa merah (seksi KHP);
17. Ada 2 kegiatan UPPKA (Workshop dan Bimtek Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha), untuk Workshop sudah terlaksana tetapi untuk Bimtek terkendala di bahan dan alat praktek pelatihan yang semula diberikan per orang akan dirubah per paket 1 kelompok (Seksi KS);
18. Kegiatan yang bermitra dengan BKOW ada yang mengalami penundaan karena menyesuaikan kebutuhan mitra kerja BKOW;
19. Hasil Evaluasi KLA pada tahap Verifikasi Administrasi terdapat 7 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan peringkat dan terdapat 4 Kabupaten yang terancam tidak mendapat predikat di tahun 2022 (Seksi PHA)

Upaya

1. Melakukan Perubahan dan pergeseran anggaran pada BOPPA Manajemen dan BOPPA Pencegahan (Seksi PP dan PA);
2. BOPPA Pencegahan pada Rakor Pencegahan KTA dan TPPO akan dilaksanakan 3 termin (Juli, September dan November) (Seksi PA);
3. Bulan ini akan koordinasi pembahasan Rapergub Perlindungan Anak dengan Biro Hukum (Seksi PA);
4. Akan berkoordinasi dengan TU Gubernur untuk SK Lomba Pelaksana Terbaik Penggerakan dan Baksos KB (Seksi KIE);
5. Penyusunan draft awal RAD Terhadap Pengendalian Penduduk dan KB Berbasis Desain Program Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi KIE (KB KIE);
6. Melakukan Koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pendataan PPKBD yang mendampingi Akseptor (Seksi KB);
7. Akan mengajukan SPP untuk melunasi kekurangan bayar ATK sebesar Rp 10,- di e-blangkon (Seksi KB);
8. Kerjasama lintas sektor untuk menindaklanjuti kegiatan pelatihan PPEP (Seksi KHP);
9. Untuk Bimtek Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha yang terkendala alat praktek pelatihan akan dirubah di Perubahan (Seksi KS);

10. Koordinasi dengan Mitra Kerja BKOW;
11. Melakukan desk pendampingan, review capaian KLA Kab/Kota dan pendampingan langsung terhadap Kabupaten/Kota yang menghadapi Verifikasi Lapangan secara intens, terutama bagi Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan peringkat (Seksi PHA).

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota (Seksi PP);
2. Advokasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan di Kawasan Industri (Seksi PP);
3. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan/TPPO (Seksi PP);
4. Rakor Pencegahan KTA dan TPPO (Seksi PA);
5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi tingkat daerah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota (seksi PA);
6. Monitoring dan EValuasi Peningkatan Kapasitas PPKBDKabupaten/Kota (Seksi KB);
7. FGD Bersama Mitra KB (Aisyiyah, Muslimat NU) (Seksi KIE);
8. Pelatihan PPEP (Seksi KHP);
9. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan (Seksi KHP);
10. Workshop PPRG Kabupaten/Kota (Seksi KHP);
11. Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (Kab. Sukoharjo dan Kab. Banyumas) (Seksi Dalduk);
12. Daring Workshop Penurunan Angka Stunting Melalui Kegiatan Kelompok BKB (Seksi KS);
13. Pembentukan Komunitas Kreatif di Kab. Banyumas;
14. ToT Forum Anak di Kab. Banyumas;
15. Rapat APSAI di Kota Semarang;
16. Penyusunan Buku Pedoman Lansia di Kota Semarang;
17. Forum Anak Goes to School tanggal 11-13 Juli di sekolah-sekolah di kab/kota di Jateng;
18. Peringatan Hari Anak Nasional di Kab. Banyumas tanggal 26-27 Juli 2022.

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya.

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Juni 2022, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	45.11	47.89	44.58	2.78
2	Sekretariat	49.87	46.64	43.92	1.61
3	Bidang KHPP	43.84	20.06	19.02	2.81
4	Bidang PHPA	17.48	66.21	61.47	2.58
5	Bidang KB KIE	50.39	48.53	39.01	15.82
6	Bidang DALDUK KS	43.71	56.30	52.28	4.82
7	Bidang Data Parmas	56.21	51.47	47.97	0.09

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juni 2022 untuk menjadikan periksa.

Semarang, Kamis, 8 Juli 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PEREMPUAN DAN ANAK JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001